

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

Christina Rachmawati, Dri Utari & Hasani, Ismail. 2013. *MASA DEPAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusinal Warga*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

El-Muhtaj, Majda. 2012. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.

Fatah, Rohadi Abdul. 2004. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House.

Halili. 2016. *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2015: Politik Harapan Minim Pembuktian*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Margiyono, dkk. 2010. *Bukan Jalan Tengah Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. Jakarta: ILRC

Naipospos, Bonar Tigor & Robet, Robertus. 2009. *Beragama Berkeyakinan dan Berkonstitusi*. Jakarta: Publikasi Setara Institute.

Nasution, Adnan Buyung & M. Zen, A. Patra. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

R, Safrina Fauziah. 2013. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi Ri Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusinal Warga*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Rohman, Sa'id, Arif, dan Purnomo. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Program Sekolah Demokrasi PLaCIDS.

Sihombing, Uli Parulian. 2008. *Menggugat Bakor Pakem Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: ILRC

Sinambela, Lijah Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2003. *PENELITIAN HUKUM NORMATIF Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wahyudi, Arief dkk. 2014. *Mengurai Langkah Berbeda Penanganan Perkara Penodaan Agama; Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan 744/Pid.B/PN-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pid/2010*. Jakarta: ILRC

#### **Sumber Jurnal:**

Budijanto, Oki Wahyu. 2016. Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung. *Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 Nomor 1, Juli, Halaman 35-44*.

Marzuki, Suparman. 2013. Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial Volume 6 Nomor 3, Halaman 189-206*.

Masrin. 2013. Studi tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Jurnal Pemerintahan Integratif Volume 1 Nomor 1, Halaman 66-81*.

Sambuari, Fista prilia. 2013. Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Lex Administratum Volume 1 Nomor 2, Halaman 17-24*.

Sopiyan, Yayan. 2015. Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009). *Jurnal Cita Hukum Volume 2 Nomor 2, Halaman 195-2012*.

Subiyanto, Achmad Edi. 2011. Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 5, Halaman 707-732*.

Sumadi, Ahmad Fadlil. 2011. Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 5, Halaman 631-648*.

Syafi'ie, M. 2011. Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi Volume Nomor 8 Nomor 5, Halaman 675-706*.

Thames, Knox. 2011. Mechanism for Religious Freedom Advocay. *International Journal of Religious Freedom Volume 4 Nomor 1, Halaman 115-123*

Widiastuti. 2013. Analisis SWOT Keberagaman Budaya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widya. Volume 1 Nomor 1, Halaman 8-14*.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

*International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

**Media Cetak:**

Gatra edisi 23-29 November 2017

Harian Kompas 4 April 2018

**Media Daring:**

Kompas.com Diakses pada Kamis, 29 Maret 2018 Pukul 20:58

Kompas.com Diakses pada 3 Juli 2018 Pukul 10:28

Medan.tribunnews.com Diakses pada Kamis, 29 Maret 2018 Pukul 21:28 WIB

Nasional.sindonews.com Diakses pada Minggu, 4 Februari 2018 Pukul 21:17 WIB

Sindonews.com Diakses pada 3 Juli 2018 Pukul 11.20

Tribunnews.com Diakses pada 8 September 2018 Pukul 21.30 WIB